

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM
SOSIALISASI PANCASILA DI INDONESIA**

Skripsi



Disusun Oleh :

**Feizal Fikri
NIM. 20150610118**

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Feizal Fikri

NIM : 20150610118

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SOSIALISASI PANCASILA DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 1 Juni

2020



HALAMAN MOTTO

“Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”.- (Q.S. Ali Imran : 155)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi yang sederhana ini.

Tidak lupa pula penulis haturkan salawat serta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangannya lah kita dapat merasakan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Penulis persesembahkan skripsi ini kepada,

Bapak saya tersayang

Muhammad Irfan W.

&

Ibu saya tersayang

Nur Hanik

Yang selalu mendoakan saya disetiap ibadahnya, yang selalu mengingatkan saya untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang sesuai anjuran syariat Islam, yang selalu menyemangati saya disetiap masalah yang saya hadapi, dan yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan materiil setiap anak-anaknya.

Terimakasih banyak, semoga skripsi ini dapat sedikit membala pengorbanan yang sudah dilakukan dan ini adalah wujud bukti serta ucapan terimakasih ku kepadamu Bapak dan Ibu ku yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu alaikum. Wr. Wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dengan Partai Politik di Indonesia”, sebagai penuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik dan lancar.
2. Rasulullah SAW, sebagai panutan bagi penulis dalam setiap langkah dan perbuatan selama ini.
3. Bapak dan Ibu ku yang tidak pernah berhenti untuk memanjatkan doa kepada ku kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan cobaan hidup kepada Allah SWT.
4. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Trisno Raharjo, S.H.,M.hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

6. Ibu Septi Nur Wijayanti, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing penelitian ini, yang dengan baik hati meluangkan sedikit waktunya di sela kesibukan untuk penulis melakukan bimbingan.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Segenap keluarga besarku yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menjalani segala dinamika pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. seluruh teman-teman seperjuangan ku Alfi Syahri Lubis, Julian Ranik, Abi Harahap, Nishaf, Deni, Rizal, Munandar dan kawan-kawan lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan sarannya agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga hasil penulisan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Yogyakarta, 1 Juni 2020



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMABAHAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. IDEOLOGI PANCASILA	7
1. Pengertian sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia	9
2. Pancasila sebagai Dasar Negara.....	13
3. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa	20
B. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	23
1. Kedudukan MPR Pra-Perubahan UUD 1945	23
2. Kedudukan MPR Pasca Perubahan UUD 1945	26
C. SEJARAH BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.....	28
1. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7)	28
2. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).....	31
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Jenis Data	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36

4. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	38
A. Perbandingan Kelembagaan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	38
1. MPR dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	38
2. BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	50
B. Perbandingan Kewenangan dan/atau Tugas MPR dan BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	69
1. Persamaan Kewenangan antara MPR dan BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	69
2. Perbedaan Kewenangan antara MPR dan BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	71
3. Kewenangan BPIP Berdasarkan Tugas Masing-Masing Deputinya	79
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

1. Tabel 01.....	69
2. Tabel 02	71